

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

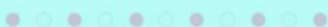
**# bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'la atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran kinerja selama Tahun Anggaran yang telah berakhir guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Adapun penyusunan Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari kuantitas maupun kualitas data yang disajikan, oleh sebab itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Palangka Raya, 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Ir. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 196603151992031010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan. Penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja.

Sebagaimana bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaporan kinerja pemerintah menjadi aspek penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi. Sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, teruji dan diandalkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3.1. Maksud.....	3
1.3.2. Tujuan.....	3
1.4 STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2025.....	3
1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
1.5.1. Tugas.....	4
1.5.2. Fungsi.....	4
1.6 SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
1.7 ISU STRATEGIS.....	11
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 PROSES PERENCANAAN.....	13
2.1.1 Visi dan Misi.....	13
2.2 TUJUAN DAN SASARAN.....	7
2.2.1 Tujuan.....	7
2.2.2 Sasaran.....	15
2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	15
2.3.1 Strategi.....	15
2.3.2 Program.....	17
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	18
2.5 PERJANJIAN KINERJA.....	21
2.6 PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2025.....	23

2.7	MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI DARI INSPEKTORAT	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		27
3.1	CAPAIAN KINERJA.....	29
3.2	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR..	35
3.3	MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.....	38
3.4	MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL.....	40
3.5	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI;	41
3.6	ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA;	47
3.7	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA	49
BAB IV PENUTUP		55
4.1	KESIMPULAN	55
4.2	RENCANA TINDAK LANJUT BERDASARKAN REKOMENDASI INSPEKTORAT .	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Bagan Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	6
Tabel 1. 2 Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025.....	7
Tabel 1. 3 Komposisi PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Jabatan Tahun 2025.....	7
Tabel 1. 4 Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2025	8
Tabel 1. 5 Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Tahun 2025	8
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025	19
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025	25
Tabel 2. 3 Program Sekretariat Daerah Tahun 2025	23
Tabel 2. 4 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Dari Inspektorat	24
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja.....	30
Tabel 3. 2 Interpretasi Predikat PKO.....	30
Tabel 3. 3 Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	31
Tabel 3. 4 Pengukuran Kinerja.....	31
Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Organisasi.....	31
Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Biro pada Sekretariat Daerah Tahun 2025	34
Tabel 3. 7 Standar Efisiensi Anggaran	47
Tabel 3. 8 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	47
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Sasaran Pertama	51
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Sasaran Kedua.....	51
Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Sasaran Ketiga.....	52
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Sasaran Keempat	52
Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Sasaran Kelima	53
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Sasaran Keenam	53
Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran Sasaran Ketujuh.....	54
Tabel 3. 16 Perbandingan Capaian Kinerja Utama dan Kinerja Keuangan .Error! Bookmark not defined.	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon	10
Gambar 3. 1 Alur Kerangka Pikir SAKIP	28
Gambar 3. 2 Diagram Capaian Kinerja Setda TA 2025.....	34
Gambar 3. 3 Kurva Distribusi Predikat Kinerja Pegawai	35
Gambar 3. 5 Diagram Capaian Kinerja Berdasarkan Target RPJMD 2021-2026.....	39
Gambar 3. 5 Perbandingan SAKIP di Regional Kalimantan Tengah Tahun 2025.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah Tahun 2025
Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025
Rencana Aksi Sekretaris Daerah Tahun 2025
Rencana Kinerja Tahunan Sekretaris Daerah Tahun 2025
Foto Kegiatan Akuntabilitas Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa setiap daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2021-2026 yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam menjalankan rencana pembangunan selama 5 tahun yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 sesuai visi dan misi kepala daerah maka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), yang dijabarkan kembali ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah dan melaporkan hasil capaian kinerja tersebut pada akhir tahun anggaran.

Untuk mengukur capaian keberhasilan dan kegagalan dalam rencana kinerja pemerintah yang telah diatur dalam INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Pelaporan LAKIP menggambarkan kinerja suatu instansi pemerintah, sedangkan kinerja menguraikan capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Penyelenggaraan pemerintah yang menghasilkan kinerja yang baik mencerminkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, akurat, efektif, efisien dan transparansi.

Dengan terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan akuntabel, perjanjian kinerja yang efektif, efisien dalam bentuk manajemen berbasis kinerja, instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut mencerminkan peningkatan kinerja berorientasi hasil, yang terukur, dapat memberikan dampak dan manfaat yang dirasakan langsung bagi masyarakat secara luas.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan berdasarkan pada beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur yaitu :

- a. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- g.. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- i. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3.2. Tujuan

- a. Terwujudnya Laporan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan.
- b. Memberikan informasi mengenai sasaran, target, dan capaian kinerja.
- c. Memberikan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja penyelenggara pemerintahan yang telah direncanakan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2025

Terbentuknya Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang dirinci sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Biro sebagai berikut :
 - a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Biro Hukum.
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Biro sebagai berikut :
 - a. Biro Perekonomian;
 - b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c. Biro Administrasi Pembangunan.
4. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 Biro sebagai berikut :
 - a. Biro Organisasi;
 - b. Biro Umum; dan
 - c. Biro Administrasi Pimpinan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Uraianya sebagai berikut :

1.5.1. Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah;
- d. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah;
- e. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan organisasi;
- f. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- g. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, administrasi pimpinan dan umum; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

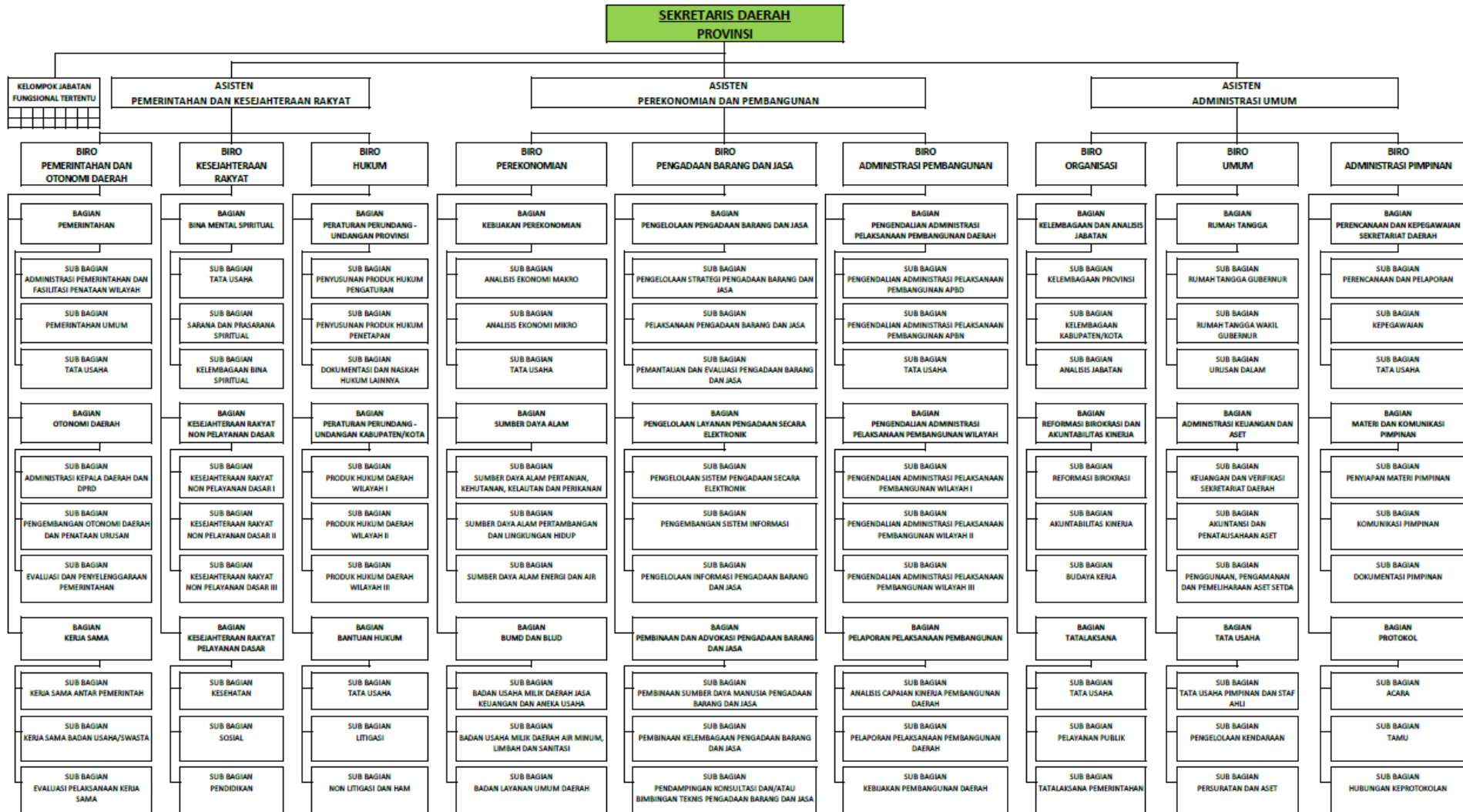
1.5.2. Fungsi

Dalam upaya menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah;

- e. Pembinaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan organisasi;
- f. Fasilitasi administrasi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- g. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, administrasi pimpinan dan umum; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 1. 1 Bagan Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020



1.6 SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 291 orang dan honorer sebanyak 227 orang, Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai data per Desember 2025 secara rinci dapat dilihat tabel sebagai berikut ini.

Tabel 1. 2 Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	PNS		JUMLAH (ORANG)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	S.3	3	0	3
2.	S.2	30	28	58
3.	S.1	94	72	166
4.	D.4	17	8	25
5.	D.3	3	10	13
6.	D.2	0	0	0
7.	D.1	0	0	0
8.	SMA/SEDERAJAT	43	15	58
9.	SMP/SEDERAJAT	2	3	5
10.	SD/SEDERAJAT	1	0	1
JUMLAH				329

Tabel 1. 3 Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

JABATAN	JUMLAH (ORANG)
PNS	329
Sekretaris Daerah	-
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1
Asisten Administrasi Umum	-
Staf Ahli	2
Kepala Biro	5
Kepala Bagian	25
Kepala Sub Bagian	22
Pelaksana	274
Non PNS	250
PPPK Penuh Waktu	247
PPPK Paruh Waktu	3
Total	583

Tabel 1. 4 Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2025

JABATAN	JENJANG ESELON	JUMLAH (ORANG)
Sekretaris Daerah	Eselon I.b	-
Asisten	Eselon II.a	1
Staf Ahli	Eselon II.a	2
Kepala Biro	Eselon II.b	5
Kepala Bagian	Eselon III.a	25
Kepala Sub Bagian	Eselon IV.a	22
Pelaksana	-	274
Jumlah	-	329

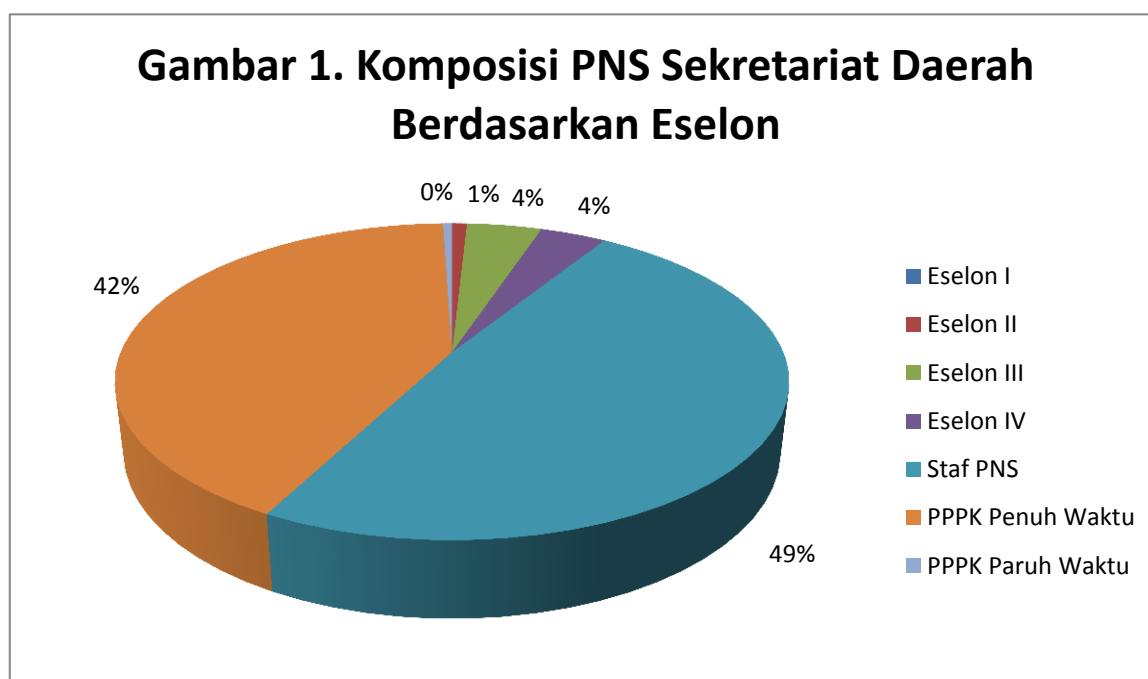
Tabel 1. 5 Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Tahun 2025

JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH (ORANG)
	IV	III	II	I	
Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1	-	-	-	1
Asisten Administrasi Umum	-	-	-	-	-
Staf Ahli	2	-	-	-	2
Unit Kerja :					
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah					48
Kepala Biro	-	-	-	-	-
Kepala Bagian	3	-	-	-	3
Kepala Sub Bagian	1	-	-	-	1
Staf	-	22	-	-	22
PPPK Penuh Waktu	-	-	-	-	22
Biro Kesejahteraan Rakyat					36
Kepala Biro	-	-	-	-	-
Kepala Bagian	3	-	-	-	3
Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
Staf	-	17	2	-	19
PPPK Penuh Waktu	-	-	-	-	13
Biro Hukum					49
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Kepala Bagian	3	-	-	-	3
Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1

JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH (ORANG)
	IV	III	II	I	
Staf	2	24	-	-	26
PPPK Penuh Waktu	-	-	-	-	18
Biro Perekonomian					39
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Kepala Bagian	3	-	-	-	3
Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
Staf	2	23	2	-	27
PPPK Penuh Waktu	-	-	-	-	7
Biro Pengadaan Barang / Jasa					47
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Kepala Bagian	3	-	-	-	3
Kepala Sub Bagian	1	-	-	-	1
Staf	1	35	-	-	36
PPPK Penuh Waktu	-	-	-	-	5
PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	1
Biro Administrasi Pembangunan					37
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Kepala Bagian	2	-	-	-	2
Kepala Sub Bagian	1	-	-	-	1
Staf	1	25	2	-	28
PPPK Penuh Waktu	-	-	-	-	5
Biro Organisasi					33
Kepala Biro	-	-	-	-	-
Kepala Bagian	3	-	-	-	3
Kepala Sub Bagian	-	1	-	-	1
Pelaksana	1	17	1	-	19
PPPK Penuh Waktu	-	-	-	-	9
PPPK Paruh waktu	-	-	-	-	1
Biro Umum					224
Kepala Biro	-	-	-	-	-
Kepala Bagian	2	1	-	-	3
Kepala Sub Bagian	-	9	-	-	9

JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH (ORANG)
	IV	III	II	I	
Staf	-	28	32	-	60
PPPK Penuh Waktu	-	-	-	-	151
PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	1
Biro Administrasi Pimpinan					67
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Kepala Bagian	2	-	-	-	2
Kepala Sub Bagian	-	6	-	-	6
Staf	-	37	8	-	45
PPPK Penuh Waktu	-	-	-	-	13
Total	36	242	65	1	583

Gambar 1. Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon



Gambar 1. 1 Grafik Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

1.7 ISU STRATEGIS

Dalam Isu strategis eksternal yang merupakan tantangan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang masih kurang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
3. Kurangnya koordinasi antara Biro-Biro dalam hal menyatukan sebuah visi dan misi yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan;
4. Kompetensi SDM untuk memahami tugas pokok dan fungsi masih kurang;
5. Lemahnya informasi sesuai tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pembangunan;
6. Lemahnya koordinasi baik sektoral maupun antar daerah;
7. Belum tersedianya sistem dan prosedur kerja yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
8. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap pakai terampil dan profesional dibidangnya;
9. Kurangnya komitmen dari masing-masing pimpinan dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan secara efektif;
10. Belum optimalnya aplikasi sistem informasi Keuangan Daerah dan kualitas jaringan internet;
11. Belum tersusunnya Proses Bisnis yang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah;

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Menguraikan tentang penjelasan umum Sekretariat Daerah dan penekanan pada aspek organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas uraian ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pencapaian kinerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran bersangkutan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun bersangkutan;
- b. Membandingkan antara realisasi dengan tahun sebelumnya;
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalanatau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi;
- d. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;
- e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan uraian simpulan umum atas pencapaian kinerja.

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama 2025
2. Perjanjian Kinerja 2025
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PROSES PERENCANAAN

Suatu proses perencanaan kinerja merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan dokumen RPJMD 2021 – 2026, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis maupun gambaran keterkaitan antara Sasaran, Indikator Kinerja dan Target pada perencanaan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Perencanaan perlu terus dikembangkan agar menjadi dasar perencanaan anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan berdasarkan kebutuhan prioritas untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan program pemerintah yang berorientasikan pada hasil (outcome) dan ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan RPJMD 2021-2026 dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul.

Proses ini menghasilkan dokumen perencanaan yang sistematis, antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di lingkup Pemerintah Daerah, RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENJA (Rencana Kerja) di lingkup Perangkat Daerah serta Dokumen Perjanjian Kinerja (IKU, PK, RA dan RKT) antar pemangku jabatan dan pemberi amanah. Adapun visi dan misi Sekretariat Daerah dirumuskan sebagaimana uraian berikut ini :

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah yang merupakan merupakan dokumen penting sebagai pijakan dan dorongan untuk memajukan pembangunan daerah di segala bidang yang jelas dan terarah untuk kebutuhan masyarakat secara luas, maka Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sama mengikuti Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah yang diuraikan sebagai berikut :

**“Kalimantan Tengah Makin BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**

MISI

Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;
2. Memperkuat Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mempercepat Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;
5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang Beriman, Berbudaya dan Kesetaraan Gender.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dengan berpedoman pada VISI dan MISI Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka tujuan dan sasaran disinergikan dengan pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi tujuan dan sasaran pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Sebagai gambaran kondisi yang ingin dicapai yang menjadi faktor penting untuk mencapai keberhasilan, telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

2.2.1 Tujuan

Dalam tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 5 (lima) tahun yang telah ditentukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Pemerataan Pembangunan Melalui Konektivitas Antar Wilayah;
2. Meningkatkan Tingkat Kondisivitas Daerah Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pengurangan Kemiskinan Masyarakat;
3. Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif.

2.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menentukan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah;
3. Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah;
4. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pembentukan dan Penyesuaian Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Pelayanan Publik, Memperkuat Daya Saing Daerah dan Menjaga Integritas NKRI;
5. Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi;
7. Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka ditetapkan strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun strategi dan kebijakan tersebut yang diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Strategi

Adapun kebijakan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan;
3. Memberikan Pelayanan Informasi dan Fasilitas administrasi Pemerintahan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
4. Meningkatkan Efisiensi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Elektronik;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang urusan kesejahteraan rakyat;
6. Meningkatkan kualitas SDM penunjang urusan kesejahteraan rakyat;
7. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana spiritual;
8. Meningkatkan fasilitas bina spiritual;

9. Meningkatkan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
10. Meningkatkan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
11. Melakukan padu serasi dan penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan untuk dibahas di DPRD sehingga dalam pengajuan RAPERDA telah memenuhi syarat porses dan substansi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Melakukan padu serasi penyelarasan Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan untuk ditetapkan;
13. Penguatan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan dan BUMD melalui Sistem Terintegrasi yang mendorong Iklim Investasi dan kondusif;
14. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Air;
15. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pertambangan dan LH;
16. Penguatan Sistem Perekonomian di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan;
17. Interaktif, komunikatif dan informatif terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
18. Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
19. Meningkatnya efektifitas dan kinerja melalui peningkatan tata kelola administrasi pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah;
20. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens terhadap pelaksanaan capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah;
21. Meningkatkan kapasitas cakupan maupun kualitas pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan melalui optimalisasi koordinasi dan fasilitasi pembinaan;
22. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens sesuai SOP terhadap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui tender dan nontender yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
23. Peningkatan Tatakelola pemerintahan yang baik;
24. Optimalisasi pelayanan publik dan pengembangan standarisasi;
25. Peningkatan pelayanan laporan kinerja perangkat daerah;
26. Revitalisasi Sarana dan Prasarana guna meningkatkan daya dukung; dan

27. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas untuk kepentingan Publik dan Pimpinan;
28. Meningkatkan Pelayanan kepada Pimpinan dengan Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan untuk mewujudkan tercapainya atau terpenuhinya dokumen perencanaan di lingkup Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Meningkatkan Pelayanan kepada Pimpinan untuk mewujudkan tercapainya atau terpenuhinya pelayanan kegiatan Pimpinan (Protokol dan Humas).

2.3.2 Program

Sedangkan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang akan diambil dan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Perumusan Administrasi Kewilayahan;
2. Melaksanakan Perumusan Kebijakan Otonomi Daerah;
3. Melaksanakan Penggunaan Aplikasi Peraturan Sistem Pemerintahan Elektronik;
4. Peningkatan Kompetensi SDM Melalui Diklat dan Bimtek;
5. Pembinaan Pengembangan Karir SDM Secara Reguler;
6. Peningkatan Kualitas Pembinaan Sarana Prasarana Spiritual dan Kelembagaan Bina Spiritual;
7. Terbentuknya rancangan peraturan daerah dan peraturan Gubernur;
8. Peningkatan Sistem Satu Data dan Informasi Terintegrasi untuk Mengembangkan Daya Saing Daerah dan Promosi Potensi Daerah;
9. Penguatan Sistem Koordinasi, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di Bidang
10. Lembaga Keuangan Daerah Penguatan Manajemen dan Capacity Building SDM BUMD;
11. Penguatan Sistem Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi dan Air;
12. Mewujudkan Proses Pengadaan Yang Memenuhi Prinsip Pengadaan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku;
13. Menjadikan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Daerah;
14. Meningkatkan kualitas data informasi dan pembangunandaerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
15. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan;
16. Penyusunan peraturan dan standarisasi sarana prasarana kantor;

17. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja pelayanan;
18. Menjaga kualitas kondisi sarana dan prasarana yang baik;
19. Peningkatan Inovasi dalam keterbukaan informasi publik melalui sistem yang terintegrasi dalam manajemen pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
20. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah;
21. Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
22. Meningkatkan Perencanaan Setda di lingkup Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang terpadu, Transparan dan Akuntabel berbasis Teknologi dan Informatika;
23. Memantapkan Peningkatan kualitas Perencanaan di lingkup Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam pengukuran kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menguraikan tugas dan fungsi serta sasaran prioritas instansi pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan indikator ukuran berupa hasil (outcome) yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan penyelarasan yang telah disusun di Rencana Strategis dengan kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana tingkat keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika didalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menentukan IKU memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyiangan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsensus serta wajib menggunakan prinsip dan pemikiran yang kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparan guna menghasilkan informasi yang handal. Indikator Kinerja Utama tersebut adalah indikator ukuran capaian yang terukur, akuntabel dan transparan meliputi indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagaimana uraian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Hasil Perhitungan dari BPS	BPS dan Bank Indonesia
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	$x = \frac{y}{z} \times 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Kebijakan Perekonomian
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	$x = \frac{y}{z} \times 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Kebijakan Perekonomian
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	$x = \frac{y}{z} \times 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian BUMD dan BLUD
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	$x = \frac{y}{z} \times 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian BUMD dan BLUD
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	$x = \frac{y}{z} \times 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Sumber Daya Alam
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	$x = \frac{y}{z} \times 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Sumber Daya Alam
2.	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan Realisasi Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	RENSTRA dan DPA-SKPD
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Data dan Capaian Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang Tepat Waktu/Total Data Keseluruhan x 100%	Biro Administrasi Pembangunan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
		Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyampaian Data/Total Data Keseluruhan x 100%	Biro Administrasi Pembangunan Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
4.	Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Otonomi (pemekaran wilayah) dan Penataan Urusan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah	Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota
		Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah aspek dalam LPPD Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu penyampaian LKPJ Gubernur kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sesuai UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 69 ayat 1 dan 2 (paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir)	Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	Rumus dari Segi Jumlah : Jumlah Paket Pengadaan Diselesaikan Tepat Waktu Paket Pengadaan dibagi Jumlah Paket Sesuai dengan Jadwal pada RUP dikali 100 Rumus dari Segi Nilai : Jumlah Paket Pengadaan Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai dengan Jadwal pada RUP dibagi Total Nilai Paket Pengadaan dikali 100	RENSTRA 2021-2026
		Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Layanan SPSE dari uptime Jumlah Waktu Harian SPSE Bisa Diakses dibagi 365 hari dikali 100	RENSTRA 2021-2026
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	LHE Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	LHE Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Total Nilai Survei yang Telah Dilaksanakan Dibagi Jumlah Perangkat yang Melaksanakan Survei dikali 100	Biro Organisasi Bagian Tatalaksana
7.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Berdasarkan Jumlah Produk Hukum yang Masuk	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Berdasarkan Jumlah Produk Hukum yang Masuk	Biro Hukum
		Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Berdasarkan Jumlah Produk Hukum yang Masuk untuk dilakukan evaluasi dan fasilitasi	Biro Hukum

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk mewujudkan target kinerja tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimiliki melalui program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk mengoptimalkan tercapainya sasaran dan target dengan tepat waktu sehingga dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah disederhanakan dalam

Rencana Strategis (RENTRA) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Target yang telah ditentukan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun anggaran, Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persentase	4,5 – 5,5
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	Dokumen	5
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	Dokumen	6
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
		2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Persen	100
		Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Persen	100
4.	Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Kegiatan	5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	7
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	40
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	Persen	100
		Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Persen	100
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	BB
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	92
7.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Rancangan Perda	10
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Pergub	30
			Rancangan Keputusan Gubernur	300
		Terwujudnya Penataan dan Pengelolaan serta Penyebarluasan Informasi Hukum melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Hukum	Katalog	100
			Dokumen	1
		Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Buku	100
			Raperda difasilitasi	30
			Rancangan Perda dan Perkada Dievaluasi	42
	Rancangan peraturan bupati/walikota difasilitasi	300		

2.6 PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2025

Program pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 9 Biro dengan masing-masing kegiatan dan anggaran menurut substansinya, anggaran tersebut digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat secara luas, terpercaya, akuntabel dan transparan.

Anggaran Pembangunan tahun 2025 dimasing-masing Biro dalam mendorong peningkatan kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 3 Program Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	2.019.000.000	Biro Perekonomian
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp.	206.103.482.422	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp.	1.115.755.022	Biro Administrasi Pembangunan
4.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp.	3.374.127.727	Biro Pemerintahan
5.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	1.644.288.948	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6.	Program Penataan Organisasi	Rp.	1.418.292.540	Biro Organisasi
7.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.	1.797.637.786	Biro Hukum

2.7 MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI DARI INSPEKTORAT

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/097/LHE/2025/INSP Tanggal : 29 APRIL 2025. Maka Sekretariat Daerah Provinsi melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengkoordinir 9 Biro dengan masing-masing kegiatan dan anggaran menurut substansinya telah menyusun Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Matriks Tindak Lanjut tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Dari Inspektorat

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Kendala
A. Perencanaan Kinerja					
1.	Perjanjian Kinerja (PK) di tahun-tahun selanjutnya supaya diformalkan. Diformalkan maksudnya adalah dokumen terkait telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	Perjanjian Kinerja (PK) di tahun selanjutnya akan diformal dalam artian disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	Masing-Masing Biro Lingkup Sekretariat Daerah dikoordinir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Selesai	
2.	RKT dan PK Tahun 2024 dan tahun selanjutnya supaya dipublikasikan di laman resmi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada https://setda.kalteng.go.id .	RKT dan PK Tahun 2024 dan tahun selanjutnya akan segera dipublikasikan di laman Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada https://setda.kalteng.go.id	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	
3.	RKT dan PK Setda supaya selaras dengan RKT Biro-Biro, baik indikator kinerja maupun target capaian kinerja.	RKT dan PK Setda telah diselaraskan dengan RKT Biro-biro	Masing-Masing Biro Lingkup Sekretariat Daerah dikoordinir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Selesai	
4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dan selanjutnya setda supaya diformalkan.	Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dan selanjutnya setda telah diformal dalam artian disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Selesai	
5.	Membuat dokumen analisis crosscutting di level internal setda (antar biro).	Masih menunggu pengesahan RPJMD 2025-2030	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	
6.	Rencana Aksi pencapaian kinerja tahunan supaya diformalkan.	Rencana Aksi tahun 2024 dan selanjutnya setda telah diformal dalam artian disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Selesai	

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Kendala
B. Pengukuran Kinerja					
1.	Membuat SOP teknis pengukuran dan pengumpulan data yang berlaku di lingkup internal Sekretariat Daerah.	Masih menyusun konsep SOP teknis pengukuran dan pengumpulan data yang berlaku di lingkup Sekretariat Daerah	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	
2.	Target capaian pada dokumen LKjIP disesuaikan dengan target capaian berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah yang telah diformalkan.	Penyesuaian masih disusun terkait Target capaian pada dokumen LkjiP disesuaikan dengan target capaian berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah yang telah diformalkan	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	
3.	Memuat perhitungan capaian kinerja pada LKjIP serta melampirkan data pendukung dan/atau kertas kerja perhitungan capaian kinerja pada pengukuran kinerja di tahun tahun selanjutnya.	Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi akan memuat perhitungan capaian kinerja dengan mengimplementasi Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) di laporan triwulan sekretariat daerah secara online melalui bit.ly/MONEVRENAKSISSETDAKALTEN G2025	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Selesai	
4.	Menyusun dokumen yang menggambarkan penempatan pegawai yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.	dokumen penempatan pegawai yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja masih dirancang konsepnya	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	
5.	Menyusun dokumen yang menggambarkan hasil Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (Refocusing) Organisasi, Strategi, Kebijakan, Aktivitas, serta anggaran, dapat berupa revidi, kajian, matrik perbandingan atau hal lainnya yang relevan.	Penyusunan dokumen yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (Refocusing) Organisasi, Strategi, Kebijakan, Aktivitas, serta Anggaran masih dalam proses	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	
6.	LKjIP supaya memuat informasi mengenai efisiensi yang dijelaskan secara rinci per program dan kegiatan sehingga berdampak pergeseran anggaran pada program yang kerjanya kurang memuaskan.	LkjiP lingkup Sekretariat Daerah akan memuat informasi mengenai efisiensi yang dijelaskan secara rinci per program dan kegiatan	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	
C. Pelaporan Kinerja					
1.	Menyampaikan LKjIP tahunan tepat waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Masing-masing Biro di lingkup Sekretariat Daerah diharapkan dapat menyampaikan LkjiP tepat waktu	Masing-Masing Biro Lingkup Sekretariat Daerah dikoordinir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	
2.	LKjIP supaya mencantumkan seluruhnya capaian indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam Rencana Kinerja Tahunan.	Capaian Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan dalam Rencana Kinerja Tahunan akan dicantumkan seluruhnya pada LKjIP	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Kendala
3.	LKjIP supaya menginformasikan sepenuhnya perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional (Benchmark Kinerja).	LkjIP diharapkan sepenuhnya dapat menampilkan semua perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level daerah/nasional (Benchmark Kinerja) bila ada	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Selesai	
4.	Semua bukti pelaksanaan tindaklanjut dari laporan kinerja triwulan supaya didokumentasikan secara valid.	Bukti pelaksanaan tindaklanjut dari laporan kinerja triwulan akan didokumentasikan secara valid	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	
5.	Menyampaikan dokumen/bukti pelaksanaan tindaklanjut dari laporan kinerja triwulan, uang digunakan untuk penyesuaian penggunaan anggaran (penghematan).	Menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindaklanjut dari laporan kinerja triwulan, yang digunakan untuk penyesuaian penggunaan anggaran (penghematan)	Masing-Masing Biro Lingkup Sekretariat Daerah dikoordinir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	
6.	Menyampaikan dokumen, dapat berupa kajian, analisis atau hal lainnya yang relevan, yang berisi tentang hasil pelaporan kinerja telah membawa dampak atau mempengaruhi budaya kinerja organisasi, seperti telah terimplementasinya reward and punishment berbasis pencapaian perjanjian kinerja, inovasi, manajemen talenta, dan lain sebagainya.	Penyusunan Dokumen berupa kajian, analisis atau hal lainnya yang relevan, yang berisi tentang hasil Pelaporan Kinerja yang telah membawa dampak atau mempengaruhi budaya kinerja organisasi masih dalam proses	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Proses	
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
1.	Semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat/APIP ditindaklanjuti sampai dengan selesai.	Semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat/APIP dilakukan secara bertahap sampai selesai	Masing-Masing Biro Lingkup Sekretariat Daerah dikoordinir oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Selesai	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan secara perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku pengemban amanah masyarakat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented government, perlu terus dikembangkan agar menjadi anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Pemerintah yang berorientasi pada output langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah fungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah sebagai kinerja, bukan kemampuan penyerapan anggaran, namun demikian anggaran tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja.

Sedangkan akuntabilitas kinerja diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan.

Perjanjian Kinerja adalah ukuran target kinerja yang dicapai sebagai konsekuensi pimpinan organisasi terhadap pimpinan yang lebih tinggi, sehingga tingkat capaian kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan kegagalan, pengukuran tingkat capaian kinerja dengan membandingkan target sasaran strategis dan capaian kinerja.



Gambar 3. 1 Alur Kerangka Pikir SAKIP

3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari rangkaian komponen SAKIP yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas target kinerjanya masing-masing bersumber dari data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara pengukuran hasil capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus pengukuran kinerja sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :






$$\text{Prosentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat penilaian terhadap kinerja pemerintah dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal yang dijabarkan sebagai berikut : Lalu setelah capaian kinerja telah diukur selanjutnya dilakukan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO). PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, terdapat 5 (lima) predikat yang digunakan untuk menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi dengan mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas Entitas Akuntabilitas Kinerja yang dinilai, sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja

Nilai Kinerja Organisasi (PKO)	Predikat PKO	Warna
ISTIMEWA	$X > 100\%$	
BAIK	$80\% < X \leq 100\%$	
BUTUH PERBAIKAN	$60\% < X \leq 80\%$	
KURANG	$20\% < X \leq 60\%$	
SANGAT KURANG	$0\% < X \leq 20\%$	

Selanjutnya, setiap predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Interpretasi Predikat PKO

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

Adapun predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Interpretasi	Keterangan
AA	0%	Pada Tahun 2025 Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah "B" (63,35 kategori baik) maka koreksi capaian PK setelah normalisasi sebesar 15%
A		
BB	10	
B	15%	
CC	20%	
C	30%	
D		

Pelaporan kinerja berdasarkan capaian kinerja yang tertuang di Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 7 Sasaran dengan 27 (dua puluh satu) indikator dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| Sasaran 1 terdiri atas 7 (tujuh) indikator | Sasaran 5 terdiri dari 2 (dua) indikator |
| Sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator | Sasaran 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator |
| Sasaran 3 terdiri dari 2 (dua) indikator | Sasaran 7 terdiri dari 9 (sembilan) indikator |
| Sasaran 4 terdiri dari 3 (tiga) indikator | |

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persentase	4,5 – 5,5	4,80	90,57	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	Dokumen	5	12	240,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6	3	50,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	Dokumen	6	12	200,00	
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	12	1200,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	Dokumen	1	12	1200,00	
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	12	1200,00	
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan	8	6	75,00	
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Persen	100	100	100,00	
		Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Persen	100	100	100,00	
4.	Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Kegiatan	5	9	180,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	7	7	100,00	
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	40	12	30,00	
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	Persen	100	100	100,00	
		Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Persen	100	100	100,00	
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	BB	72,90 (BB)	104,14	Nilai Sementara
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB	62,87 (B)	89,81	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	92	86,79	94,34	
7.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang	Rancangan Perda	10	7	70,00	
			Rancangan Pergub	30	59	196,67	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Kalimantan Tengah	Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan					
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Keputusan Gubernur	300	506	168,67	
		Terwujudnya Penataan dan Pengelolaan serta Penyebarluasan Informasi Hukum melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Hukum	Katalog	100	0	0	
			Dokumen	1	1	100	
			Buku	100	40	40,00	
		Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Raperda difasilitasi	30	58	193,33	
			Rancangan Perda dan Perkada Dievaluasi	42	47	183,33	
			Rancangan peraturan bupati/walikota difasilitasi	300	550	111,90	

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terakhir yang dikeluarkan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk sebagai evaluator internal, predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah “B” (63,35 kategori baik) dengan koreksi capaian PK setelah

normalisasi sebesar 15%. Maka hasil perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dijabarkan pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Penilaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	"Nilai Akhir Capaian PK (3)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persentase	4,5 – 5,5	4,80	90,57	90,57	15%	76,98%
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	Dokumen	5	12	240,00	110	15%	93,50%
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6	3	50,00	50,00	15%	42,50%
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	Dokumen	6	12	200,00	110	15%	93,50%
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	12	1200,00	110	15%	93,50%
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	Dokumen	1	12	1200,00	110	15%	93,50%
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	12	1200,00	110	15%	93,50%
2.	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan	8	6	75,00	75,00	15%	63,75%
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Persen	100	100,00	100,00	100,00	15%	85,00%
		Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Persen	100	100,00	100,00	100,00	15%	85,00%

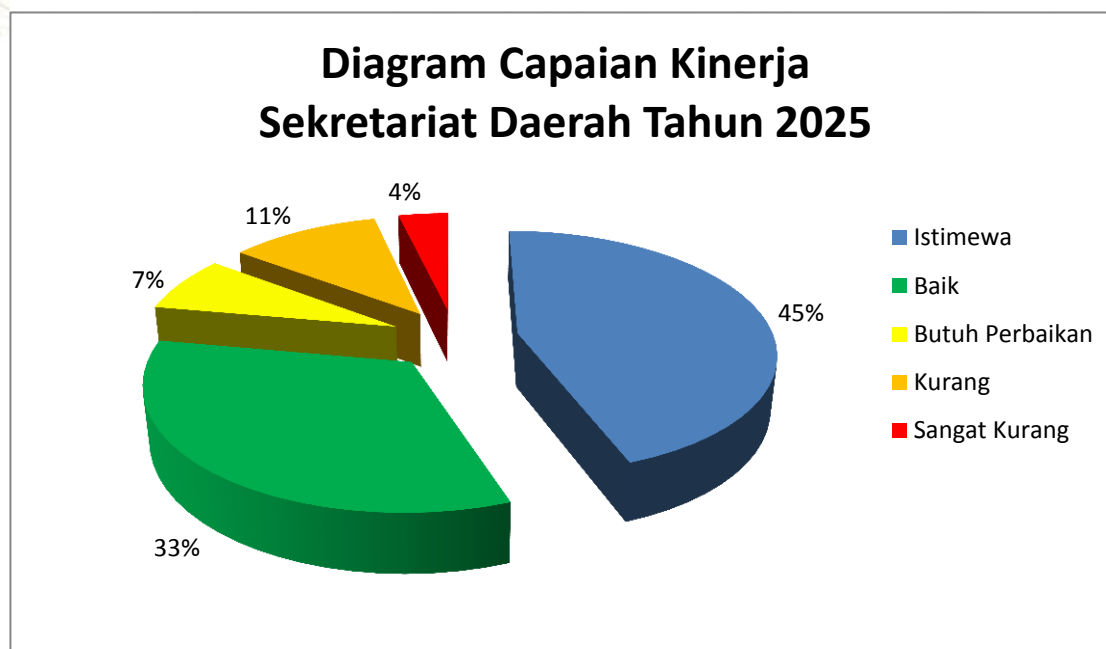
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	"Nilai Akhir Capaian PK (3)
4.	Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Kegiatan	5	9	180,00	110	15%	93,50%
		Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	7	7	100,00	100,00	15%	85,00%
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	40	12	30,00	30,00	15%	25,50%
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	Persen	100	100,00	100,00	100,00	15%	85,00%
		Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Persen	100	100,00	100,00	100,00	15%	85,00%
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	BB	72,90	104,14	104,14	15%	88,52%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB	62,87	89,81	89,81	15%	76,34%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	92	86,79	94,34	94,34	15%	80,19%
7.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Rancangan Perda	10	7	70,00	70,00	15%	59,50%
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Pergub	30	59	196,67	110	15%	93,50%
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Keputusan Gubernur	300	506	168,67	110	15%	93,50%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	"Nilai Akhir Capaian PK (3)
		Terwujudnya Penataan dan Pengelolaan serta Penyebarluasan Informasi Hukum melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Hukum	Katalog	100	0	0,00	0,00	15%	0,00%
	Dokumen		1	1	100,00	100,00	15%	85,00%	
	Buku		100	40	40,00	40,00	15%	34,00%	
		Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Raperda difasilitasi	30	58	193,33	110	15%	93,50%
	Rancangan Perda dan Perkada Dievaluasi		42	550	183,33	110	15%	93,50%	
	Rancangan peraturan bupati/walikota difasilitasi		300	47	111,90	110	15%	93,50%	
Total Capaian PK									2085,78%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK									77,25%
Predikat PKO									BUTUH PERBAIKAN

Dari capaian realisasi 27 (dua puluh tujuh) target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) Indikator menunjukkan hasil **Istimewa (44,4%)**;
2. 9 (sembilan) Indikator menunjukkan **Baik (33,3%)**;
3. 2 (dua) Indikator menunjukkan **Butuh Perbaikan (7,4%)**;
4. 3 (satu) Indikator menunjukkan **Kurang (11,1%)**;
5. 1 (satu) Indikator menunjukkan **Sangat Kurang (3,7%)**.

Gambar 3. 2 Diagram Capaian Kinerja Setda TA 2025



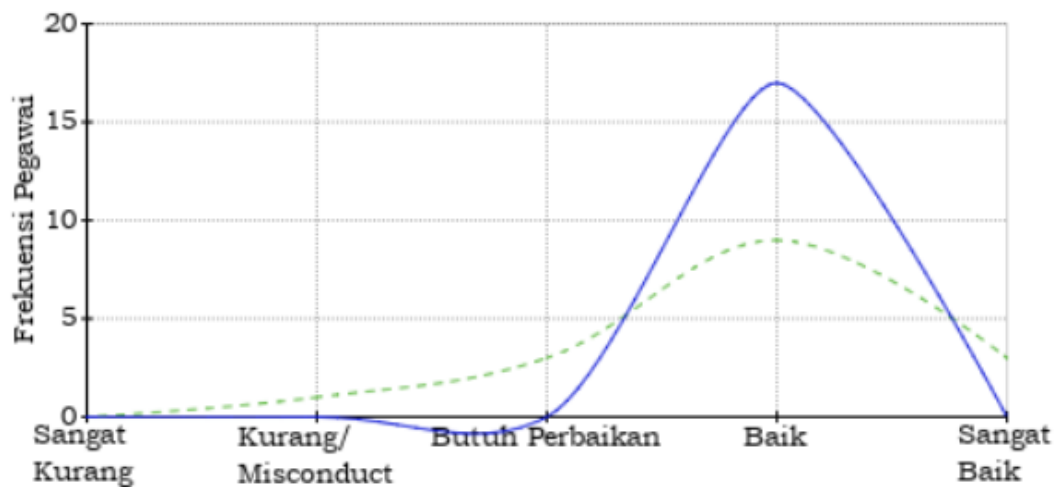
Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Biro pada Sekretariat Daerah Tahun 2025

Kategori Capaian	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Hukum	Biro Administrasi Pembangunan	Biro Perekonomian	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Umum	Biro Organisasi	TOTAL
Istimewa	1	5	0	5	0	0	0	0	1	12
Baik	1	1	2	1	0	0	2	0	2	9
Butuh Perbaikan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Kurang	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Sangat Kurang	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	3	9	2	6	1	0	2	0	3	27

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah melakukan perhitungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 level di atasnya yaitu Gubernur Kalimantan Tengah. Maka Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) yang diperoleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan Baik sesuai dengan ekspektasi yang disampaikan pimpinan melalui aplikasi ekinerja.bkn.go.id.

Gambar 3. 3 Kurva Distribusi Predikat Kinerja Pegawai dengan Capaian Kinerja Organisasi Baik



3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

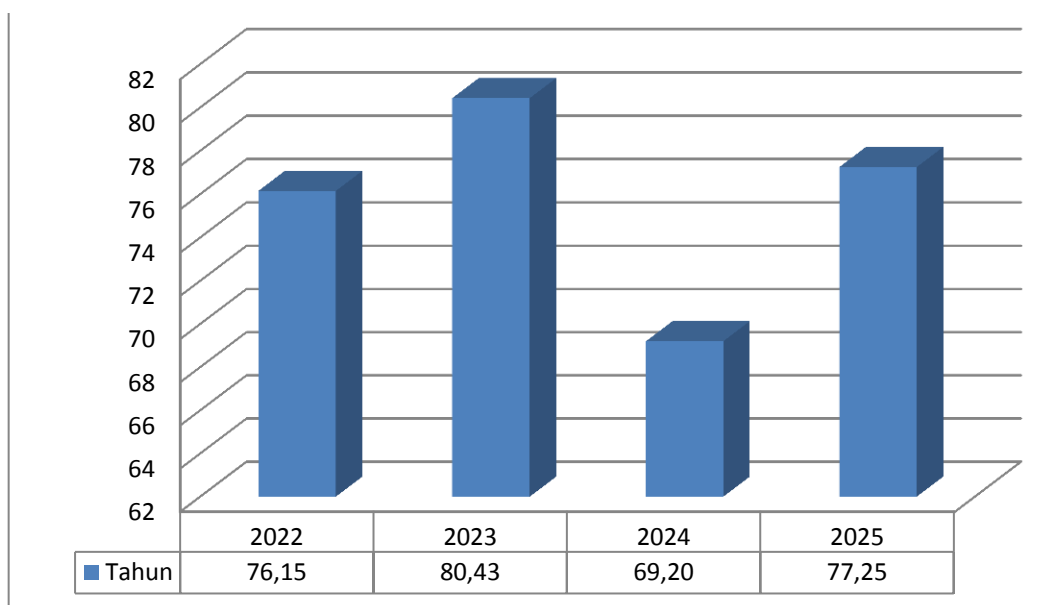
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				Realisasi				Capaian			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persentase	5,5 – 6,5	6,0 – 7,0	3,0 – 4,0	4,5 – 5,5	6,45	4,14	4,46	4,80	99,23	69,00	111,50	90,57
2.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	Dokumen	110	0	12	5	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	240,00
3.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	0	0	12	6	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	50,00
4.	Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	Dokumen	0	13	6	6	0	5	5	12	0,00	38,46	83,33	200,00
5.	Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	55	0	12	1	0	2	2	12	0	0	16,67	1200,00
6.	Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	Dokumen	55	0	12	1	0	2	2	12	0	0	16,67	1200,00
7.	Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	55	0	12	1	0	2	2	12	0	0	16,67	1200,00
8.	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen	0	0	7	8	0	0	7	6	0	0	100,00	75,00
9.	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD,	Persen	100	100	100	100	95,86	89,14	100	100,00	95,86	89,14	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				Realisasi				Capaian			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah													
10.	Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Persen	100	100	100	100	80,25	100	100	100,00	80,25	100,00	100,00	100,00
11.	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Kegiatan	1	4	4	5	0	0	4	9	0,00	0,00	100,00	180,00
12.	Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	0	0	7	7	0	0	7	7	0,00	0,00	100,00	100,00
13.	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	9	9	47	40	21	21	47	12	233,33	233,33	100,00	30,00
14.	Pengadaan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Persen	100	100	100	100	100	100	99,45	100,00	100,00	100,00	99,45	100,00
16.	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	B (65)	B (60)	BB (70)	BB (70)	B (62,29)	B (63,78)	B (63,78)	BB (72,90)	100,00	100,00	91,11	104,14
17.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B (65)	BB (70)	BB (70)	BB (70)	B (62,81)	B (63,05)	B (62,30)	B (62,87)	100,00	90,07	89,00	89,81
18.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87	88	90	92	81,85	85,62	84,77	86,79	96,89	93,01	94,19	94,34
19.	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Rancangan Perda	10	10	6	10	20	9	13	7	200,00	90,00	216,67	70,00
20.	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Rancangan Pergub	50	50	50	30	48	63	51	59	96,00	126,00	102,00	196,67

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				Realisasi				Capaian			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
21.	Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Keputusan Gubernur	750	750	500	300	596	619	502	506	79,47	82,53	100,40	168,67
22.	Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Raperda difasilitasi	0	0	30	100	0	0	39	58	0	0	130,00	193,33
23.		Rancangan Perda dan Perkada Dievaluasi	90	90	42	42	59	51	40	550	65,56	56,67	95,24	183,33
24.		Rancangan peraturan bupati/walikota difasilitasi	0	0	300	300	0	0	545	47	0	0	181,67	111,90

Perbandingan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama beberapa tahun terakhir setelah menerapkan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) yang dimulai pada Tahun 2024 (69,20) mulai mengalami peningkatan di Tahun 2025 (77,25) naik sebesar 8,05 poin.

Gambar 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Pertahun



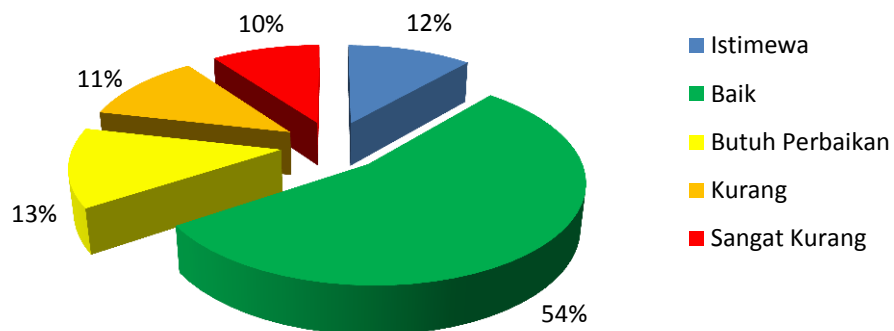
3.3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD (Tahun)					Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,57	5,60	5,70	5,80	5,90	
	Realisasi	Persen	3,40	6,45	4,14	4,46	4,80	
	Capaian		95,24	115,18	72,63	76,90	81,36	
Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	11	11	12	13	14	
	Realisasi	Dokumen	-	-	-	7	6	
	Capaian		-	-	-	53,85	42,87	
Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	3. Predikat Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	
	Realisasi	Nilai	CC 59,73	B (62,29)	B (63,78)	B (63,78)	BB (72,90)	
	Capaian		74,66	100,00	100,00	91,11	104,14	
	4. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (SKM)	Indeks	87	88	90	92	94	
	Realisasi		82,79	85,26	81,85	84,77	86,79	
	Capaian		95,16	96,89	90,94	92,14	92,33	
	5. Nilai SAKIP	Nilai	B	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	
	Realisasi		B 62,44	B (62,81)	B (63,05)	B (62,30)	B (62,87)	
	Capaian		100,00	100,00	80,00	89,00	78,59	
	6. Perda Kelembagaan Organisasi Daerah	Perda/ Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	1 Perda, 5 Pergub	
	Realisasi		3 Pergub	2 Pergub	4 Pergub	1 Perda, 4 Pergub	2	
	Capaian		60,00	40,00	80,00	80,00	40,00	
7. Pengadaan Tepat Waktu			-	20	50	75	100	
Realisasi			-	95,97	100	100	100	
Capaian			-	479,85	100,00	100,00	100,00	
8. Ketersediaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)	Persen		-	100	100	100	100	
Realisasi	Persen		-	99,72	99,99	99,45	100	
Capaian			-	99,72	99,99	99,45	100,00	
9. Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Persen		100	100	100	100	100	
Realisasi	Persen		85,47	100	100	100	100	
Capaian			85,47	100,00	100,00	100,00	100,00	
10. Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi tentang Pembangunan Daerah di Provinsi	Persen		100	100	100	100	100	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD (Tahun)					Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	
	Kalimantan Tengah							
	Realisasi	Persen	-	80,25	100	100	100	
	Capaian		-	80,25	100,00	100,00	100,00	
	11. Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Perda	10	10	10	10	10	
	Realisasi	Rancangan Perda	10	20	9	13	7	
	Capaian		100,00	200,00	90,00	130,00	70,00	
		Rancangan Pergub	50	50	50	50	50	
	Realisasi	Rancangan Pergub	50	48	63	51	59	
	Capaian		100,00	96,00	126,00	102,00	118,00	
	12. Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Keputusan Gubernur	750	750	750	750	750	
	Realisasi	Rancangan Keputusan Gubernur	630	596	619	502	506	
	Capaian		84,00	79,47	82,53	66,93	67,47	
	13. Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Perda dan Perkada Dievaluasi	179	185	191	194	197	
	Realisasi	Rancangan Perda dan Perkada Dievaluasi	27	59	51	40	47	
	Capaian		15,08	31,89	26,70	20,62	23,86	

Perbandingan capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan target yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama beberapa tahun terakhir secara garis besar telah memenuhi 66% dari capaian kinerja yang diharapkan (Istimewa dan Baik).

Gambar 3. 5 Diagram Capaian Kinerja Berdasarkan Target RPJMD 2021-2026



3.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target PK 2025	Target Standar Nasional
Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	BB (70)	BB (71,38)

Salah satu indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional adalah Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam mewujudkan target Program Prioritas Nasional 7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan yang telah tertuang di dalam RPJMN 2025-2029.

Gambar 3. 6 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani				
6	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98	71,38	77,26
7	Indeks Pelayanan Publik	3,78 (2023)	3,68 ^{a)}	3,80
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79 (2023)	3,00	2,00 ^{b)}
9	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93	93,5	95,5

Dimana hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan nilai sebesar 72,90 dengan predikat “BB” telah memenuhi target indikator nasional yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Nasional sebesar 71,38 dengan capaian sebesar 102,13.

Terkait nilai final masih menunggu masa sanggah yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan selesai pada bulan Maret 2026. Hasil final akan diumumkan melalui *website* <https://www.portalrb.id/> atau kanal resmi youtube Menpan RB.

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI;

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa realisasi keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 sebesar 77,25 persen (Butuh Perbaikan). Persentase ini ditentukan dengan menggunakan rumus perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dan telah diimplementasikan secara online melalui bit.ly/MONEVRENAKSISSETDAKALTENG2025. Berdasarkan hal tersebut maka analisis Keberhasilan atau kegagalan dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah

Untuk capaian kinerja pada sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah” terdapat 5 Indikator “Memuaskan”, 1 Indikator “Baik”, 1 Indikator “Butuh Perbaikan”.

Faktor Kegagalan :

- 1) Perencanaan yang tidak tepat.
- 2) Prasarana dan sarana pendukung yang kurang.
- 3) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia tidak memadai.

Adapun Faktor Pendukung Keberhasilan adalah :

- 1) Dukungan dana yang mencukupi.
- 2) Adanya kerjasama yang baik.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis terkait mengenai semua bidang yang berkaitan.
- 2) Mengadakan sarana dan prasarana yang mendukung.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan sesuai bidang tugasnya.
- 4) Terkait dari sisi target yang masih belum tercapai 100% maka akan dilakukan reviu perencanaan pada sasaran ini di tingkat Biro dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah

Untuk capaian kinerja pada sasaran "Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah", 1 indikator telah mencapai target 75,00% (Kurang), Adapun faktor pendukung keberhasilan adalah :

- 1) Fasilitas kantor telah menunjang kinerja pegawai.
- 2) Koordinasi yang baik antar pegawai maupun dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten, kota dan kementerian.
- 3) Program yang ditetapkan telah memenuhi realisasi keuangan yang diinginkan.
- 4) Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, pemimpin masih mampu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada pegawainya untuk mengoptimalkan kinerja.

Faktor Kegagalan :

- 1) Pencapaian realisasi keuangan hanya berjalan sebesar 77,85 sehingga tidak mencapai target yang direncanakan.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan:

- 1) Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan agar dapat dilakukan analisis sehingga akar permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai hambatan atau kendala yang dapat dijadikan feedback untuk perencanaan dan pelaksanaan kinerja di tahun berikutnya.
- 2) Reviu dan perbaikan terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, dan target jangka menengah.
- 3) Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan agar terus disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas yang dihadapi.

3. Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah

Untuk capaian kinerja pada sasaran "Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah", 2 indikator telah mencapai target 100% (Baik).

Adapun faktor pendukung keberhasilan adalah :

- 1) Kualitas pelaporan dan kajian pembangunan melalui monev kegiatan berjalan dengan baik.
- 2) Kualitas pengendalian pembangunan daerah melalui sinkronisasi aspek pengendalian pembangunan dari aspek perencanaan sudah baik.

- 3) Penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kualitas percepatan pelayanan publik sudah baik.
- 4) Pengembangan data/informasi yang diperlukan telah terpantau secara sistematis.

Faktor Kegagalan :

- 1) Tujuan pengendalian perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dan rencana masih kurang tercapai.
- 2) Permintaan target pelaksanaan program kegiatan yang meningkat tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas perencanaan.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan: :

- 1) Reviu dan perbaikan perencanaan terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, dan target jangka menengah.
- 2) Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan di lingkungan kerja, hendaknya dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas yang dihadapi.
- 3) Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 4) Perlu upaya strategis dan inovatif agar kegiatan dapat dilakukan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.

4. Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan

Untuk capaian kinerja pada sasaran "Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan" terdapat 1 Indikator "Memuaskan", 1 Indikator "Baik", 1 Indikator "Kurang".

Adapun faktor pendukung keberhasilan adalah :

- 1) Adanya dana pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Tersedianya personil dan pegawai yang cukup memadai.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana.
- 4) Adanya harmonisasi, komitmen, etos kerja dan koordinasi di tingkat biro.
- 5) Adanya pengaturan kewenangan yang jelas.

Faktor Kegagalan :

- 1) Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang mengakibatkan perencanaan akan berubah.

- 2) Belum optimalnya pemahaman dan pola pikir dalam bekerja.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen berbasis kinerja.
- 4) Masih lemahnya pemanfaatan potensi SDM dalam penunjang kinerja.
- 5) Belum optimalnya koordinasi antara instansi/lintas sektoral.
- 6) Belum optimalnya kualitas/kompetensi SDM.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan::

- 1) Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dilakukan melalui kegiatan monitoring berkala ke Kabupaten/Kota.
- 2) Mengoptimalkan kinerja Aparatur Pelaksana melalui pelatihan dan mentoring.

5. Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk capaian kinerja pada sasaran "Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa", 2 indikator telah mencapai target 100% (Baik).

Adapun faktor pendukung keberhasilan adalah :

- 1) Perencanaan yang sudah sesuai ketentuan.
- 2) Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.

Faktor Kegagalan :

- 1) Dukungan dana yang tidak memadai
- 2) Prasarana dan sarana pendukung yang belum memenuhi kebutuhan

Alternatif Solusi yang telah dilakukan: :

- 1) Mengusulkan perencanaan anggaran yang sesuai kebutuhan.
- 2) Memaksimalkan prasarana dan sarana pendukung yang ada.

6. Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi

Untuk capaian kinerja pada sasaran "Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi" 1 indikator telah mencapai target "Memuaskan dan 2 indikator telah mencapai target "Baik".

Adapun faktor pendukung keberhasilan adalah :

- 1) Program yang ditetapkan telah memenuhi realisasi keuangan yang diinginkan.
- 2) Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, pemimpin masih mampu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada pegawainya di setiap kesempatan untuk mengoptimalkan kinerja. Dalam peran pengambilan keputusan, pemimpin dapat dikatakan demokratis karena menyertakan masukan dari pegawainya secara musyawarah.
- 3) Koordinasi yang baik antar pegawai maupun dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan kementerian.

- 4) Fasilitas kantor yang diberikan telah menunjang kinerja pegawai.

Faktor yang mendorong kegagalan dalam pencapaian kinerja yaitu :

- 1) Perencanaan kinerja masih belum mencerminkan kinerja organisasi yang ingin dicapai.
- 2) Penetapan kinerja yang ingin diukur ternyata belum dapat mencapai target yang diinginkan.
- 3) Kualitas Sumber Daya Manusia di Biro Organisasi dapat dinilai kurang baik terlihat dari kemampuan sumber daya manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian target program kerja masih kurang.
- 4) Jaringan internet masih kurang stabil saat diperlukan.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan::

- 1) Untuk mencapai target indikator Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu “BB”, alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah membentuk kembali Tim Internal Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih terfokus pada isu strategis dalam RB General dan RB Tematik.
- 2) Untuk mencapai target indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (SAKIP) yaitu “BB”, alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 3) Untuk mencapai target Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Biro Organisasi Setda Provinsi yaitu “90”, pada tahun 2025 akan segera melakukan penyesuaian target dan pembinaan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dasar.
- 4) Untuk mencapai target Perkada kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka langkah yang dilakukan adalah melakukan perubahan indikator dan penyesuaian target kinerja agar dapat memenuhi ekspektasi pimpinan.

7. Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk capaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah” 5 indikator telah mencapai target “Memuaskan”, 1 indikator “Baik”, 1 Indikator “Butuh Perbaikan”, 1 Indikator “Kurang”, 1 Indikator “Sangat Kurang”

Adapun faktor pendukung keberhasilan adalah :

- 1) Program yang ditetapkan telah memenuhi realisasi keuangan yang diinginkan.

- 2) Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, pemimpin masih mampu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada pegawainya di setiap kesempatan untuk mengoptimalkan kinerja. Dalam peran pengambilan keputusan, pemimpin dapat dikatakan demokratis karena menyertakan masukan dari pegawainya secara musyawarah.
- 3) Koordinasi yang baik antar pegawai maupun dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan kementerian.
- 4) Fasilitas kantor yang diberikan telah menunjang kinerja pegawai.

Faktor yang mendorong kegagalan dalam pencapaian kinerja yaitu :

- 1) Perencanaan kinerja masih belum mencerminkan kinerja organisasi yang ingin dicapai.
- 2) Penetapan kinerja yang ingin diukur ternyata belum dapat mencapai target yang diinginkan.
- 3) Kualitas Sumber Daya Manusia di Biro Organisasi dapat dinilai kurang baik terlihat dari kemampuan sumber daya manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian target program kerja masih kurang.
- 4) Jaringan internet masih kurang stabil saat diperlukan.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

- 1) Reviu dan perbaikan terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, dan target jangka menengah.
- 2) Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas yang dihadapi. Langkah penyebarluasan dan implementasi secara nyata pelaksanaan berbagai kegiatan dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar sesuai target yang telah ditetapkan.
- 3) Memperkuat komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
- 4) Melaksanakan kebijakan strategis dan inovatif agar kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.

3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA;

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja. Sumber daya pendukung meliputi keuangan dan sumber daya manusia.

a) Keuangan

Standar efisiensi anggaran disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Standar Efisiensi Anggaran

No	Prosentase Kinerja Pemerintah	Kinerja
1.	<60%	Sangat Efisien
2.	60%-80%	Efisien
3.	80%-90%	Cukup Efisien
4.	90%-100%	Kurang Efisien
5.	>100%	Tidak Efisien

Analisis efisiensi penggunaan keuangan untuk tahun anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 8 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Realisasi	Efisiensi Anggaran	Kategori
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.019.000.000	1.340.190.874	1.285.874.783 95,95	63,69	Efisien
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Program Kesejahteraan Rakyat	206.103.482.422	206.247.847.925,75	160.131.653.468 77,64	77,69	Efisien
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.115.755.022	787.903.522	724.815.250 91,99	64,96	Efisien
4.	Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.374.127.727	2.735.598.469	2.571.138.587 93,99	76,20	Efisien

N o	Sasaran	Program	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Realisasi		Efisiensi Anggaran	Kategori
	Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan							
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.644.288.948	1.692.554.948	1.531.846.336	90,50	93,16	Kurang Efisien
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Program Penataan Organisasi	1.418.292.540	1.092.712.892	1.040.559.735	95,23	73,37	Efisien
7.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.797.637.786	1.703.897.786	1.646.358.163	96,62	91,58	Kurang Efisien
BELANJA LANGSUNG		Sekretariat Daerah	217.472.584.445	215.600.706.417	168.932.246.322	78,35	77,68	Efisien

Pagu anggaran pada program prioritas Sekretariat Daerah sebesar 217.472.584.445,- lalu mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 215.600.706.417,- atau mengalami pengurangan anggaran sebesar 1.871.878.028,- dari pagu awal. Realisasi anggaran hingga akhir tahun 2025 sebesar 168.932.246.322,- (78,35%) dan efisiensi anggaran yang diperoleh sebesar 48.540.338.123,- (77,68%).

Rumus perhitungan efisiensi anggaran :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \left[\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran Awal}} \times 100\% \right]$$

$$\text{Rasio Efisiensi Anggaran} = \left[\frac{168.932.246.322}{217.472.584.445} \times 100\% \right] = 77,68\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil dalam menitikberatkan pada prinsip efisiensi pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan pada tahun anggaran 2025.

b) Sumber Daya Manusia

Tabel 3. 9 Komposisi Pegawai

Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK	
	L	P	L	P
S.3	3	0	0	0
S.2	30	28	0	0
S.1	94	72	72	59
D.4	17	8	0	0
D.3	3	10	0	2
D.2	0	0	0	0
D.1	0	0	0	0
SMA/SEDERAJAT	43	15	62	44
SMP/SEDERAJAT	2	3	1	0
SD	1	0	4	6
Jumlah	193	136	139	111
Total	580			

Berdasarkan data komposisi pegawai, jumlah SDM terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK penuh waktu dan paruh waktu dengan variasi tingkat pendidikan mulai dari SMA/ sederajat hingga Strata 3 (S3). Secara kuantitatif, komposisi pegawai masih didominasi oleh:

1. Pendidikan menengah (SMA/ sederajat)
2. Pendidikan Strata 1 (S1) sebagai kelompok terbesar kedua
3. Sebagian kecil pegawai dengan pendidikan Strata 2 (S2)

Dari sisi status kepegawaian:

1. PNS masih menjadi komponen utama
2. PPPK berperan sebagai pelengkap pada jabatan tertentu

Analisis Kuantitatif Efisiensi Pegawai

1. Rasio Kualifikasi Pendidikan

Persentase pegawai berpendidikan tinggi (S1/S2) belum sepenuhnya dominan dibanding pendidikan menengah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kompetensi SDM belum sepenuhnya optimal untuk mendukung fungsi analisis kebijakan dan pelayanan publik berbasis kinerja.

2. Distribusi Pegawai Antar Unit

1. Terdapat indikasi ketidakseimbangan jumlah pegawai antar biro
2. Hal ini berpotensi menyebabkan:
 - Overstaffing pada unit tertentu
 - Understaffing pada unit lain

3. Faktor Penyebab Inefisiensi

1. Perencanaan kebutuhan pegawai belum berbasis ABK secara menyeluruh.
2. Penempatan pegawai belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi.
3. Transformasi digital belum optimal sehingga masih membutuhkan banyak tenaga administratif.
4. Pola rekrutmen historis yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan organisasi.

4. Rekomendasi Perbaikan

1. Melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) secara menyeluruh
2. Mendorong redistribusi pegawai antar unit kerja
3. Meningkatkan proporsi pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi
4. Mengoptimalkan peran PPPK pada jabatan teknis tertentu
5. Melakukan digitalisasi proses bisnis untuk mengurangi beban kerja administratif

5. Kesimpulan

Secara kuantitatif dan kualitatif, efisiensi pegawai pada Sekretariat Daerah menunjukkan kondisi **Cukup efisien namun belum optimal**, ditandai dengan masih adanya ketidaksesuaian antara jumlah, distribusi, dan kualifikasi pegawai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam penataan SDM aparatur guna mewujudkan prinsip **right man on the right job** serta meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

3.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

1. Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Sasaran Pertama

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Realisasi		Rasionalisasi Anggaran		Keterangan
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.019.000.000	1.340.190.874	1.285.874.783	95,95	-733.125.217	36,31	Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah
a)	Kegiatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	879.000.000	574.000.000	528.210.366	92,02	-350.789.634	39,91	
b)	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	430.000.000	290.000.000	282.855.221	97,54	-147.144.779	34,22	
c)	Kegiatan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	710.000.000	476.190.874	474.809.196	99,71	-235.190.804	33,13	

Terkait program atau kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator, Setelah mengalami rasionalisasi dari anggaran pagu awal sebesar Rp. 2.019.000.000,- maka realisasi pelaksanaan anggaran program perekonomian dan pembangunan sebesar Rp. 1.285.874.783,- (95,95%) di akhir tahun 2025 dengan rasio efisiensi anggaran sebesar 63,69% (Efisien). Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

2. Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Sasaran Kedua

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Realisasi		Rasionalisasi Anggaran		Keterangan
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	206.103.482.422	206.247.847.925,75	160.131.653.468	77,64	-45.971.828.954	22,31	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah
a)	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	179.328.482.422	189.085.071.131,75	143.230.299.328	75,75	-36.098.183.094	20,13	
b)	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	25.750.000.000	16.531.210.241,50	16.274.982.361	98,45	-9.475.017.639	36,80	
c)	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1.025.000.000	631.566.552,50	626.371.779	99,18	-398.628.221	38,89	

Terkait program atau kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator, terdapat kendala dalam merealisasikan anggaran sehingga program tersebut tidak tercapai 100%. Penyebab utama adalah adanya dana hibah dari dinas lingkup Provinsi Kalimantan

Tengah di triwulan IV sehingga proses penyerapan anggaran tidak dapat maksimal di akhir tahun.

3. Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah

Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Sasaran Ketiga

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Realisasi		Rasionalisasi Anggaran		Keterangan
3.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.115.755.022	787.903.522	724.815.250	91,99	-390.939.772	35,04	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah
a)	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	696.839.022	515.116.522	473.354.250	91,89	-223.484.772	32,07	
b)	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	418.916.000	272.787.000	251.461.000	92,18	-167.455.000	39,97	

Terkait program atau kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja telah direalisasikan hampir mencapai target yakni sebesar 91,99%. Adapun anggaran kegiatan pendukung yang tidak direalisasikan berupa kegiatan makan minum rapat yang tidak terlaksana, Honorarium Narasumber/Pembahas, Belanja Cetak, Perjalanan dinas dan yang lainnya berupa selisih harga antara pagu dan realisasi.

4. Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan

Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Sasaran Keempat

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Realisasi		Rasionalisasi Anggaran		Keterangan
4.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.374.127.727	2.735.598.469	2.571.138.587	93,99	-802.989.140	23,80	Biro Pemerintahan

Terkait program atau kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja yang telah direalisasikan sebesar 2.571.138.587,- (93,99%) dari anggaran perubahan sebesar Rp. 2.735.598.469,- maka serapan anggaran Tahun 2025 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan terealisasi secara baik.

5. Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Sasaran Kelima

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Realisasi		Rasionalisasi Anggaran		Keterangan
5.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.644.288.948	1.692.554.948	1.531.846.336	90,50	-112.442.612	6,84	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah
a)	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	218.276.601	300.292.601	237.819.354	79,20	+19.542.753	-8,95	
b)	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	873.632.000	901.986.000	890.060.314	98,68	+16.428.314	-1,88	
c)	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	552.380.347	490.276.347	403.966.668	82,40	-148.413.679	26,87	

Terkait program atau kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja telah direalisasikan hampir mencapai target yakni sebesar 90,50%. Beberapa anggaran pada kegiatan ada yang mengalami rasionalisasi dan ada yang mengalami pergeseran anggaran demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

6. Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi

Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran Sasaran Keenam

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Realisasi		Rasionalisasi Anggaran		Keterangan
6.	Program Penataan Organisasi	1.418.292.540	1.092.712.892	1.040.559.735	95,23	-377.732.805	26,63	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah
a)	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	514.794.140	373.604.140	354.092.400	94,78	-160.701.740	31,22	
b)	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	903.498.400	719.108.752	686.467.335	95,46	-217.031.065	24,02	

Terkait program atau kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja telah direalisasikan hampir mencapai target yakni sebesar 95,23%. Dari kendala atau hambatan terkait penyerapan anggaran dalam mencapai kinerja tidak ada. Penyerapan anggaran secara maksimal dapat terlaksana walau beberapa kali mengalami rasionalisasi anggaran.

7. Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

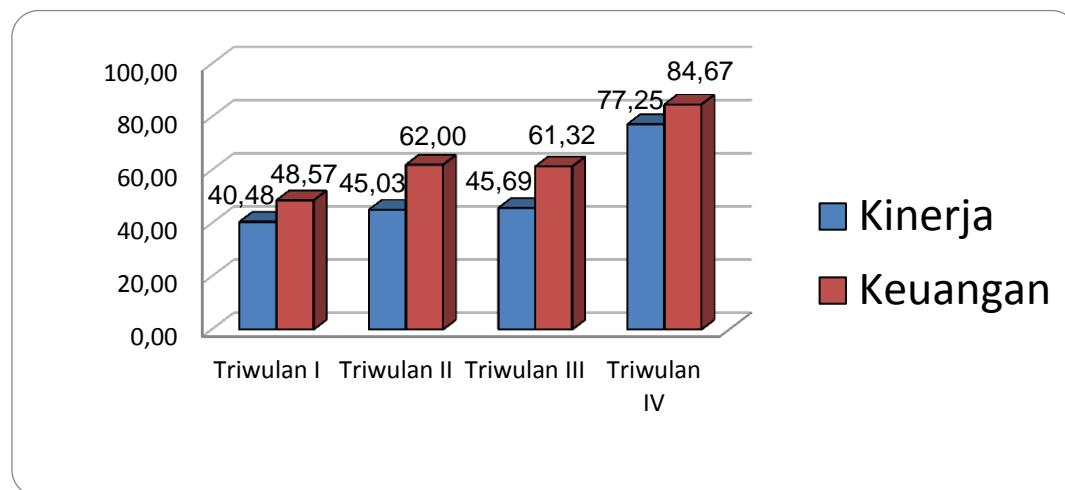
Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Sasaran Ketujuh

No	Program	Anggaran	Perubahan Anggaran	Realisasi		Rasionalisasi Anggaran		Keterangan
7.	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1.797.637.786	1.703.897.786	1.646.358.163	96,62	-151.279.623	8,42	Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
a)	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	634.131.446	564.131.446	518.119.713	91,84	-116.011.733	18,29	
b)	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	1.163.506.340	1.139.766.340	1.128.238.450	98,99	-35.267.890	3,03	

Terkait program atau kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja telah direalisasikan hampir mencapai target yakni sebesar 96,62%. Rasionalisasi anggaran pada program fasilitas dan koordinasi hukum tidak membuat dampak yang signifikan sehingga penyerapan anggaran dalam mencapai kinerja dapat berjalan dengan baik.

Dalam mengukur kinerja dan keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menggunakan aplikasi sederhana yang masih dalam proses pengembangan yaitu melalui bit.ly/MONEVRENAKSISSETDAPROVKALTENG2025 yang dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :

Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Per Triwulan



Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Persentase Penyerapan Keuangan
77,25	84,67
Butuh Perbaikan	Cukup Efisien

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Laporan kinerja ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dengan berakhirnya Tahun anggaran 2025 maka laporan kinerja ini adalah akhir dari laporan pengukuran kinerja pada periode RPJMD Tahun Anggaran 2021-2025. Pada tahun 2026 akan dimulai pengukuran kinerja pada periode RPJMD Tahun Anggaran 2025-2029.

4.1 KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan pada tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran dari Renstra.
2. Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja butuh perbaikan namun masih mendekati ekspektasi/target yang diharapkan. Masih memerlukan komitmen dan kerja keras semua komponen baik pimpinan, pejabat maupun pelaksana serta didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif, perencanaan kinerja yang matang dan koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan selanjutnya.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT BERDASARKAN REKOMENDASI INSPEKTORAT

Berdasarkan hasil analisis terhadap pencapaian kinerja maka rencana tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat yang perlu dilakukan di tahun 2026 adalah:

1. Memastikan dokumen perencanaan seperti perjanjian kinerja, indikator kinerja utama dan rencana aksi telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.
2. Dokumen perencanaan agar dipublikasikan di laman resmi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Dokumen crosscutting di level internal setda dapat segera tersusun.
4. Menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan dan pengukuran kinerja untuk lingkup Sekretariat Daerah.
5. Penyampaian Laporan Kinerja (LKIP/LkJP) agar tepat waktu.



LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD KATMA F. DIRUN**

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

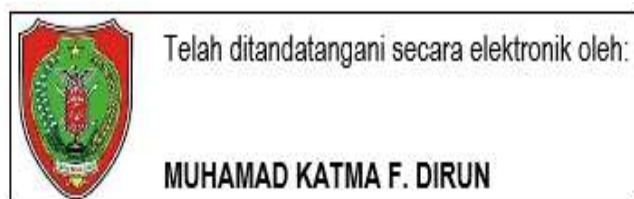
Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : SEKRETARIAT DAERAH

Tugas dan Fungsi :

Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah;
- Pembinaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan organisasi;
- Fasilitasi administrasi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, administrasi pimpinan dan umum; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian di Kalimantan Tengah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Hasil Perhitungan dari BPS	BPS dan Bank Indonesia
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Kebijakan Perekonomian
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Kebijakan Perekonomian
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian BUMD dan BLUD
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Sumber Daya Alam
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Sumber Daya Alam
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Sumber Daya Alam
2.	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan Realisasi Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	RENSTRA DAN DPA-SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Data dan Capaian Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang Tepat Waktu/Total Data Keseluruhan x 100%	Biro Administrasi Pembangunan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
		Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyampaian Data/Total Data Keseluruhan x 100%	Biro Administrasi Pembangunan Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4.	Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi (pemekaran wilayah) dan Penataan Urusan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah	Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota
		Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah aspek dalam LPPD Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu penyampaian LKPJ Gubernur kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sesuai UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 69 ayat 1 dan 2 (paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir)	Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota
		Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Fasilitas, Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	Rumus dari Segi Jumlah : Jumlah Paket Pengadaan Diselesaikan Tepat Waktu Paket Pengadaan dibagi Jumlah Paket Sesuai dengan Jadwal pada RUP dikali 100 Rumus dari Segi Nilai : Jumlah Paket Pengadaan Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai dengan Jadwal pada RUP dibagi Total Nilai Paket Pengadaan dikali 100	RENSTRA 2021-2026
		Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Layanan SPSE dari uptime Jumlah Waktu Harian SPSE Bisa Diakses dibagi 365 hari dikali 100	RENSTRA 2021-2026
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan	LHE Reformasi Birokrasi dari Kementerian

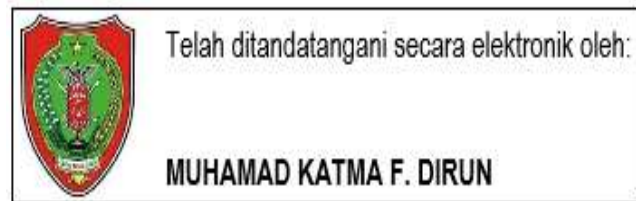
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
			Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	LHE Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Total Nilai Survei yang Telah Dilaksanakan Dibagi Jumlah Perangkat yang Melaksanakan Survei dikali 100	Biro Organisasi Bagian Tatalaksana
7.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Berdasarkan Jumlah Produk Hukum yang Masuk	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Berdasarkan Jumlah Produk Hukum yang Masuk	Biro Hukum
		Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Berdasarkan Jumlah Produk Hukum yang Masuk untuk dilakukan evaluasi dan fasilitasi	Biro Hukum

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD KATMA F. DIRUN**

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.


Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
MUHAMAD KATMA F. DIRUN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : SEKRETARIAT DAERAH

Tugas dan Fungsi :

Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah;
- Pembinaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan organisasi;
- Fasilitasi administrasi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, administrasi pimpinan dan umum; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian di Kalimantan Tengah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Hasil Perhitungan dari BPS	BPS dan Bank Indonesia
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Kebijakan Perekonomian
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Kebijakan Perekonomian
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian BUMD dan BLUD
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Sumber Daya Alam
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Sumber Daya Alam
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	$x = \frac{y}{z} x 100$ X = Persentase realisasi Y = Jumlah realisasi Z = Jumlah target	Bagian Sumber Daya Alam
2.	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan Realisasi Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	RENSTRA DAN DPA-SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Data dan Capaian Realisasi Keuangan dan Pembangunan yang Tepat Waktu/Total Data Keseluruhan x 100%	Biro Administrasi Pembangunan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
		Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyampaian Data/Total Data Keseluruhan x 100%	Biro Administrasi Pembangunan Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4.	Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi (pemekaran wilayah) dan Penataan Urusan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah	Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota
		Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah aspek dalam LPPD Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu penyampaian LKPJ Gubernur kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sesuai UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 69 ayat 1 dan 2 (paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir)	Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota
		Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Fasilitas, Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	Rumus dari Segi Jumlah : Jumlah Paket Pengadaan Diselesaikan Tepat Waktu Paket Pengadaan dibagi Jumlah Paket Sesuai dengan Jadwal pada RUP dikali 100 Rumus dari Segi Nilai : Jumlah Paket Pengadaan Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai dengan Jadwal pada RUP dibagi Total Nilai Paket Pengadaan dikali 100	RENSTRA 2021-2026
		Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Layanan SPSE dari uptime Jumlah Waktu Harian SPSE Bisa Diakses dibagi 365 hari dikali 100	RENSTRA 2021-2026
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan	LHE Reformasi Birokrasi dari Kementerian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
			Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	LHE Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Total Nilai Survei yang Telah Dilaksanakan Dibagi Jumlah Perangkat yang Melaksanakan Survei dikali 100	Biro Organisasi Bagian Tatalaksana
7.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Berdasarkan Jumlah Produk Hukum yang Masuk	Biro Hukum
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Berdasarkan Jumlah Produk Hukum yang Masuk	Biro Hukum
		Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Berdasarkan Jumlah Produk Hukum yang Masuk untuk dilakukan evaluasi dan fasilitasi	Biro Hukum

Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
MUHAMAD KATMA F. DIRUN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD KATMA F. DIRUN**

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

MUHAMAD KATMA F. DIRUN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian di Kalimantan Tengah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persentase	4,5 – 5,5
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	Dokumen	5
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	Dokumen	6
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan	8
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Persen	100
		Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Persen	100
4.	Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Kegiatan	5
		Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	7
		Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	40
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	Persen	100
		Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Persen	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

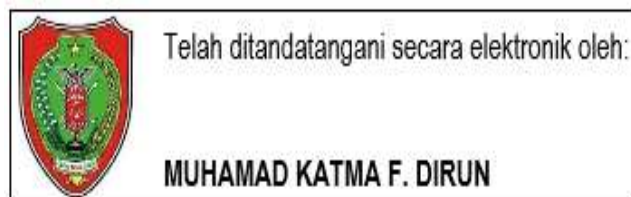
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	BB
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	92
7.	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketersediaan Informasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Rancangan Perda	10
			Rancangan Pergub	30
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Keputusan Gubernur	300
		Terwujudnya Penataan dan Pengelolaan serta Penyebarluasan Informasi Hukum melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Hukum	Katalog	100
			Dokumen	1
			Buku	100
		Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Raperda difasilitasi	30
			Rancangan perda dan perkara dievaluasi	42
Rancangan peraturan bupati/walikota difasilitasi	300			

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.019.000.000	Biro Perekonomian
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 206.103.482.422	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 1.115.755.022	Biro Administrasi Pembangunan
4.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 3.374.127.727	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.644.288.948	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6.	Program Penataan Organisasi	Rp. 1.418.292.540	Biro Organisasi
7.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.797.637.786	Biro Hukum

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD KATMA F. DIRUN**

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
MUHAMAD KATMA F. DIRUN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian di Kalimantan Tengah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persentase	4,5 – 5,5
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	Dokumen	5
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	Dokumen	6
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan	8
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Persen	100
		Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Persen	100
4.	Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Kegiatan	5
		Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	7
		Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	40
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	Persen	100
		Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Persen	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

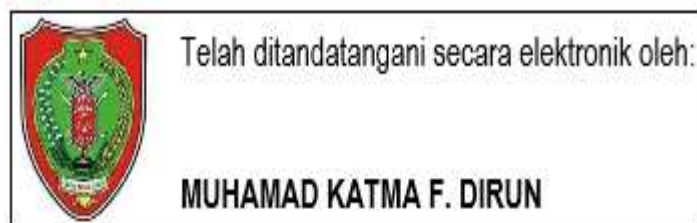
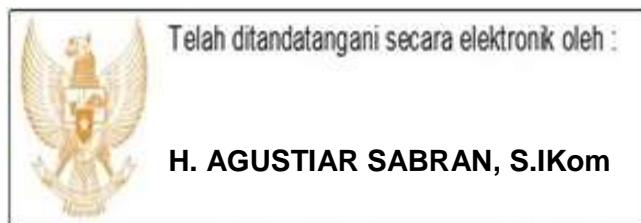
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	BB
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	92
7.	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketersediaan Informasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Rancangan Perda	10
			Rancangan Pergub	30
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Keputusan Gubernur	300
		Terwujudnya Penataan dan Pengelolaan serta Penyebarluasan Informasi Hukum melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Hukum	Katalog	100
			Dokumen	1
			Buku	100
		Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Raperda difasilitasi	30
			Rancangan perda dan perkara dievaluasi	42
	Rancangan peraturan bupati/walikota difasilitasi	300		

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.019.000.000	Biro Perekonomian
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 206.103.482.422	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 1.115.755.022	Biro Administrasi Pembangunan
4.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 3.374.127.727	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.644.288.948	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6.	Program Penataan Organisasi	Rp. 1.418.292.540	Biro Organisasi
7.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.797.637.786	Biro Hukum

Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD KATMA F. DIRUN**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

MUHAMAD KATMA F. DIRUN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111

Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

A. Target Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian di Kalimantan Tengah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persentase	4,5 – 5,5	4,5 – 4,8	4,9 – 5,0	5,1 – 5,2	5,3 – 5,5	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	Dokumen	5	0	0	0	5	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6	3	0	0	3	
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	Dokumen	6	3	3	0	0	
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	0	0	0	1	
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	Dokumen	1	0	0	0	1	
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	0	0	0	1	
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan	8	2	2	2	2	
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Persen	100	25	25	25	25	
		Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Persen	100	25	25	25	25	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
4.	Meningkatkan Fasilitasi Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Kegiatan	5	1	2	1	1	
		Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	7	3	-	2	2	
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	40	10	10	10	10	
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	Persen	100	25	25	25	25	
		Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Persen	100	25	25	25	25	
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	BB	-	-	-	BB	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB	-	-	-	BB	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	92	-	--	-	92	
7.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Rancangan Perda	10	3	3	2	2	
			Rancangan Pergub	30	6	7	8	9	
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Keputusan Gubernur	300	75	75	75	75	
		Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Raperda difasilitasi	30	7	8	8	7	
			Rancangan perda dan perkada dievaluasi	300	75	75	75	75	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
			Rancangan peraturan bupati/walikota difasilitasi	300	50	100	100	50	

B. Target Realisasi Keuangan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan		2.019.000.000	619.000.000	500.000.000	500.000.000	400.000.000	Biro Perekonomian
1.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		879.000.000	279.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
2.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		430.000.000	130.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
3.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		710.000.000	210.000.000	200.000.000	200.000.000	100.000.000	
2.	Program Kesejahteraan Rakyat		206.103.482.422	51.525.870.605	51.525.870.605	51.525.870.605	51.525.870.605	Biro Kesejahteraan Rakyat
1.	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual		179.328.482.422	44.832.120.605	44.832.120.605	44.832.120.605	44.832.120.605	
2.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		25.750.000.000	6.437.500.000	6.437.500.000	6.437.500.000	6.437.500.000	
3.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		1.025.000.000	256.250.000	256.250.000	256.250.000	256.250.000	
3.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		1.115.755.022	239.088.300	316.714.200	357.197.772	202.754.750	Biro Administrasi Pembangunan
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		696.839.022	163.406.000	182.938.500	214.658.522	135.836.000	
1.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		359.349.000	80.195.000	99.478.500	99.478.500	80.195.000	
2.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		83.915.022	12.669.000	19.003.500	39.573.522	12.669.000	
3.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		253.575.000	70.541.000	64.456.500	75.606.500	42.971.000	
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		418.916.000	75.682.300	133.775.700	142.539.250	66.918.750	
1.	Analisis Capaian Pembangunan Daerah		109.271.000	21.854.200	32.781.300	38.244.850	16.390.650	
2.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		116.602.000	15.219.500	43.081.500	46.381.500	11.919.500	
3.	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		193.043.000	38.608.600	57.912.900	57.912.900	38.608.600	
4.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah		3.374.127.727	531.580.063	1.320.490.683	998.878.002	523.178.979	Biro Pemerintahan
5.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		1.644.288.948	279.563.337,75	768.402.175,75	453.308.350,75	143.014.504,75	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa		218.276.601	21.979.837,75	143.978.087,75	37.633.837,75	14.684.837,75	
1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		109.537.250	4.047.000	105.490.250	-	-	
2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		58.739.351	14.684.837,75	14.684.837,75	14.684.837,75	14.684.837,75	
3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		50.000.000	3.278.000	23.803.000	22.949.000	-	
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		873.632.000	257.583.500	452.851.500	137.252.500	25.944.500	
1.	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		333.678.000	257.139.000	48.819.000	27.720.000	-	
2.	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		419.954.000	444.500	404.032.500	15.032.500	444.500	
3.	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		120.000.000	-	171.573.167	94.500.000	25.500.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		552.380.347	-	36.732.000	171.573.167	278.422.013	
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		132.317.034	-	32.456.000	36.732.000	95.585.034	
2.	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		215.292.979	-	102.385.167	32.456.000	182.836.979	

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
	3.	Pendampingan, Konsultasi, dan.atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	204.770.334	-	171.573.167	102.385.167	-	
6.	Program Penataan Organisasi		1.418.292.540	283.658.508	425.487.762	36.732.000	283.658.508	Biro Organisasi
		Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	514.794.140	102.958.828	154.438.242	154.438.242	102.958.828	
	1.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	194.024.080	38.804.816	58.207.224	58.207.224	38.804.816	
	2.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	156.853.100	31.370.620	47.055.930	47.055.930	31.370.620	
	3.	Penataan Analisis Jabatan	163.916.960	32.783.392	49.175.088	49.175.088	32.783.392	
		Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	903.498.400	180.699.680	271.049.520	271.049.520	180.699.680	
	1.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	226.029.820	45.205.964	67.808.946	67.808.946	45.205.964	
	2.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	158.498.940	31.699.788	47.549.682	47.549.682	31.699.788	
	3.	Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik	203.165.460	40.633.092	60.949.638	60.949.638	40.633.092	
7.	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum		1.797.637.786	249.724.315	564.738.001	565.025.313	418.150.157	Biro Hukum
		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	634.131.446	166.000.000	178.900.000	158.085.500	131.145.946	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	1.163.506.340	83.724.315	385.838.001	406.939.813	287.004.211	
TOTAL ANGGARAN			217.472.614.443	53.728.515.129	55.421.704.006	54.825.767.805	53.496.627.504	

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

MUHAMAD KATMA F. DIRUN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persentase	4,0 – 5,0
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	Dokumen	12
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	12
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	Dokumen	6
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	12
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	Dokumen	12
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	12
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan	7
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Persen	100
		Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Persen	100
4.	Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Dokumen	4
		Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	7
		Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	47

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	Persen	100
		Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Persen	100
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	BB
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	90
7.	Meningkatnya Kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Rancangan Perda	6
			Rancangan Pergub	50
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Keputusan Gubernur	500
		Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Raperda difasilitasi	30
			Rancangan perda dan perkada dievaluasi	42
			Rancangan peraturan bupati/walikota difasilitasi	300

Palangka Raya, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH,


 Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
NURYAKIN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp / Fax (0536) 3221716 Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persentase	4,5 – 5,5
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Ekonomi Makro dan Mikro	Dokumen	5
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	Dokumen	6
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	Dokumen Kegiatan	8
3.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi Data Capaian Realisasi Keuangan yang Bersumber dari Dana Pusat dan Daerah	Persentase Data Laporan dan Sinkronisasi Data Capaian Target Realisasi Keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta Pembangunan Fisik Prasarana Se-Kalimantan Tengah	Persen	100
		Persentase Penyajian Data dan Sinkronisasi Data Informasi Tentang Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Persen	100
4.	Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah dalam Fungsi Administrasi Kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Dokumen	5
		Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen Evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	7

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	40
5.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	Persen	100
		Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	Persen	100
6.	Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	A
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	94
7.	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketersediaan Informasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	Rancangan Perda	10
			Rancangan Pergub	50
		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Keputusan Gubernur	600
		Terwujudnya Penataan dan Pengelolaan serta Penyebarluasan Informasi Hukum melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Hukum	Katalog	100
			Dokumen	1
		Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Implementatif dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	Buku	100
			Raperda difasilitasi	30
			Rancangan perda dan perkada dievaluasi	42
			Rancangan peraturan bupati/walikota difasilitasi	300

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

MUHAMAD KATMA F. DIRUN